

## INTISARI

Dalam rangka mencegah risiko bencana dan memulihkan kembali kehidupan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung, pemerintah Kabupaten Karo menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung. Pada tanggal 6 April 2017, Pemerintah Kabupaten Karo menyelenggarakan *runggu* kabupaten untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana aksi tersebut. Pemerintah Kabupaten Karo sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana aksi. Namun, hingga saat ini kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Karo masih menghadapi kendala.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terjadi dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Api Sinabung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Api Sinabung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Api Sinabung melalui wadah *runggu* kabupaten belum partisipasi yang kolaboratif. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi semu. Partisipasi masyarakat melalui wadah *runggu* kabupaten tidak dapat dijangkau oleh masyarakat selain korban bencana; tidak terjadi proses saling belajar; dan pada akhirnya pemerintah yang menentukan prioritas dan keputusan akhir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Api Sinabung melalui wadah *runggu* kabupaten adalah status sosial ekonomi masyarakat; modal sosial; dan kelembagaan. Penurunan pendapatan pasca bencana yang dialami oleh masyarakat memaksa masyarakat untuk bekerja sebagai buruh tani sehingga tidak memiliki waktu yang fleksibel untuk menghadiri *runggu*. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat penanganan bencana yang lambat dan pengalaman mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan pada masa lalu menyebabkan masyarakat pesimis dengan *runggu* kabupaten. Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan *runggu* sebagai pedoman penyelenggaraan *runggu* belum sepenuhnya mengatur partisipasi masyarakat menuju partisipasi kolaboratif.

Kata Kunci: Partisipasi, Kebijakan, Bencana.

## ABSTRACT

In order to prevent disaster risks and restore people's lives affected by the eruption of Mount Sinabung, Karo Regency Government formulated the Action Plan for Rehabilitation and Reconstruction After Eruption of Mount Sinabung. On April 6, 2017, Karo Regency Government held a regency *runggu* to accommodate the aspirations of the community in formulating the action plan. Karo Regency Government has involved the community in formulating the action plan. However, until now the rehabilitation and reconstruction activities in Karo Regency were still facing obstacles.

This study aims to find out about public participation that occurs in the formulation of the Action Plan for Rehabilitation and Reconstruction After Eruption of Mount Sinabung. In addition, this study also aims to find out and analyze the factors that influence community participation in the formulation of the Action Plan for Rehabilitation and Reconstruction After Eruption of Mount Sinabung.

This research is a qualitative research presented descriptively. Data sources in this study were informants and documents. Data collection is done by interview and documentation. The data validity testing technique used is source and method triangulation. The collected data is then analyzed by reducing, presenting data, and making conclusions.

The results of this study indicate that public participation in the formulation of the Action Plan for Rehabilitation and Reconstruction After Eruption of Mount Sinabung through regency *runggu* has not been a collaborative participation. Community participation is tokenism participation. Public participation through the regency *runggu* cannot be reached by communities other than disaster victims; no mutual learning process occurs; and in the end the government determines the priorities and final decisions.

Factors affecting public participation in the formulation of the Action Plan for Rehabilitation and Reconstruction After Eruption of Mount Sinabung through regency *runggu* are the socio-economic status of the community; social capital; and institutional. Decrease in income after the disaster experienced by the community forced the community to work as farm laborers so that they did not have flexible time to attend *runggu*. The decline in public trust in the government due to slow handling of disasters and the experience of participating in development planning meetings in the past has led to community pessimism with regency *runggu*. The Terms of Reference for Work (KAK) for organizing *runggu* as a guideline for *runggu* implementation has not yet fully regulated public participation towards collaborative participation.

*Keyword: Participation, public policy, disaster*